

**PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA
MELALUI *STAKEHOLDERS NETWORKING*
DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH**

Oleh: Ishartiwi*)

Abstrak

Perkembangan budaya hidup dan kondisi alam dewasa ini telah berdampak pada terjadinya pergeseran cakupan penyandang kelainan kearah "People With Special Needs". Kondisi ini tentu mengubah implementasi kinerja tridarma perguruan tinggi pada jurusan. Otonomi daerah yang memunculkan desentralisasi pendidikan berdampak pula pada pelaksanaan program-program pendidikan di tingkat daerah, dengan manajemen melibatkan seluruh komunitas pendidikan yang salah satunya adalah perguruan tinggi. Hal ini merupakan kesempatan dan tantangan bagi jurusan PLB untuk berperan sebagai stakeholders dan sebaliknya merangkul lembaga terkait sebagai stakeholders untuk mengadakan networking yang sinergistik, sebagai implementasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang membekali ketrampilan akademik dan ketrampilan untuk hidup serta peran sertanya membangun daerah untuk penanganan penyandang kelainan. Uraian sajian ini lebih di fokuskan pada unsur pelaksanaan Research Development pada jurusan PLB, untuk modal networking.

A. Pendahuluan

Diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan diperlukan adanya strategi perencanaan program yang sesuai dengan kondisi daerah. Hal ini dibutuhkan dukungan fakta-fakta yang memberikan data basis tentang daerah. Salah satu cara yaitu melalui *Research Development* yang dilakukan di daerah, dalam hal ini BAPEDA bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan DPR sebagai pengambil kebijakan di tingkat daerah. Peran serta lembaga sebagai *stakeholders* yang saling mengisi menjadi modal kekuatan daerah untuk membangun pendidikan. Mulyana A. Nurhadi (2001) menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program-program pendidikan di daerah, peran perguruan tinggi sebagai aktor pemberdaya yang tidak pernah ada habisnya sebagai aktualisasi dari salah satu Tridarma perguruan tinggi. Kaum akademisi berperan dalam memberikan landasan konseptual yang berbasis keilmuan dan penjabaran teknis implementasi dengan visi akademik. Dalam kaitannya ini jurusan PLB berkenan memberikan rumusan rekomendasi kebijakan-kebijakan daerah dalam

* Dosen Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UNY

pengembangan program pendidikan luar biasa baik dari aspek kelembagaan dan tenaga kerjanya.

Di pihak lain kebijakan secara mikro Dikdasmen (2001) di level sekolah juga diterapkannya sistem manajemen berbasis sekolah maka membawa konsekuensi pada lembaga sekolah untuk mampu membangun visi kelembagaannya. Lembaga sekolah tidak hanya mampu meluluskan siswanya dengan berbekal ijazah (surat tanda tamat belajar) tetapi harus mampu mengembangkan kemampuan siswa dari berbagai aspek, sehingga siswa memiliki ketrampilan hidup. Kebijakan ini memberi peluang pada jurusan PLB untuk mengkaji pola pada penanganan penyandang kelainan. Adanya keunikan karakteristik peserta didik tentu saja membutuhkan berbagai alternatif kelembagaan dan pola pendidikan.

Otonomi daerah juga merubah sistem pendanaan pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan lebih dituntut untuk mandiri dan secara kreatif meraih sumber-sumber dana. Oleh karena itu pada *Resource Sharing* antar lembaga dipandang lebih menguntungkan untuk pengembangan pendidikan. Kondisi ini dapat terjadi pada lembaga-lembaga yang sudah membangun visi dan yang relevan dengan jamannya.

B. Jurusan PLB Dan Pengembangannya

Terjadinya perubahan kebijakan pendidikan saat ini membuat jurusan PLB untuk menyusun kekuatan-kekuatan dan mencari peluang untuk berperan sebagai *Stakeholders* dengan lembaga pemerintah dalam upaya pengembangan penanganan kelembagaan dan ketenagaan PLB. Hal ini juga membutuhkan *action* program-program jurusan yang dilaksanakan secara sinergistik, disamping pengkajian-pengkajian keilmuan secara terus menerus.

Kondisi ini dapat dijawab jika dalam jurusan PLB mempunyai fondasi yang kuat tentang kelembagaannya. Ishartiwi (2001) memaparkan konsep esensi yang perlu diamati dalam jurusan PLB mencakup sebagai berikut :

1. Konsep

- a. Pendidikan untuk ALB adalah proses dehumanisasi, yang terjadi di lembaga sekolah dan di luar sekolah dalam proses alamiah.

- b. PLB adalah pendidikan yang menghasilkan sarjana plus (berkemampuan akademik, berkemampuan kecerdasan emosional, dan berwawasan jiwa wira usaha) untuk menangani pendidikan ALB.
 - c. PLB tidak terbatas pada menghasilkan luaran tenaga guru saja, melainkan tenaga dengan keahlian tambahan (*speech teraphist*, pekerja sosial, pelatih orientasi mobilitas, konselor khusus tenaga assesmen ALB, pelatih bina diri, guru pembimbing khusus, dll).
 - d. PLB dirancang untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan memfasilitasi dan mengolah bidang penanganan penyandang kelainan baik di sekolah maupun di unit-unit layanan lainnya.
 - e. PLB membentuk tenaga pendidikan bagi penyandang kelainan secara umum dengan tambahan sebagai tenaga terampil sepesialis kelainan yang sesuai minat siswa.
 - f. Konsep PLB disini di tekankan pada pembentukan tenaga kependidikan ALB secara umum dan diberi ketrampilan tambahan yang memberikan peluang kerja pada lulusan secara luas, jika perlu mampu menciptakan lapangan kerja yang berupa unut-unit pelayanan. Ini dapat ditempuh pada proses pendidikan yang menyeimbangkan pemahaman teori dengan kemampuan praktek.
2. Visi Misi Jurusan PLB
- a. Visi
Suatu lembaga pendidikan tinggi yang menjadi sentra pengembangan dan produktifitas keilmuan dan ketenagaan penanganan penyandang kelainan yang memiliki keunggulan kompetitif.
 - b. Misi
Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara simultan dan terintegrasi untuk pengembangan ilmu dan penyiapan tenaga kependidikan penyandang kelainan yang memiliki kualifikasi akademik, kreatif berjiwa wirausaha berwawasan kedepan yang berorientasi pada harkat dan martabat manusia serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks pembangunan di Indonesia.

C. Model Stakeholders Networking Jurusan PLB

1. Prinsip-prinsip Networking

Salah satu ketidak siapan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan ditunjukkan salah satu hasil riset di wilayah DIY Sukanto (2001) yang menjelaskan bahwa dukungan fakta-fakta (data dasar) dan kesiapan SDM di level pemerintahan dan sekolah masih belum memadai untuk mengimplementasikan kebijakan desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang melakukan fungsi riset, mestinya mampu memberikan kontribusinya dalam dukungan fakta-fakta (data dasar).

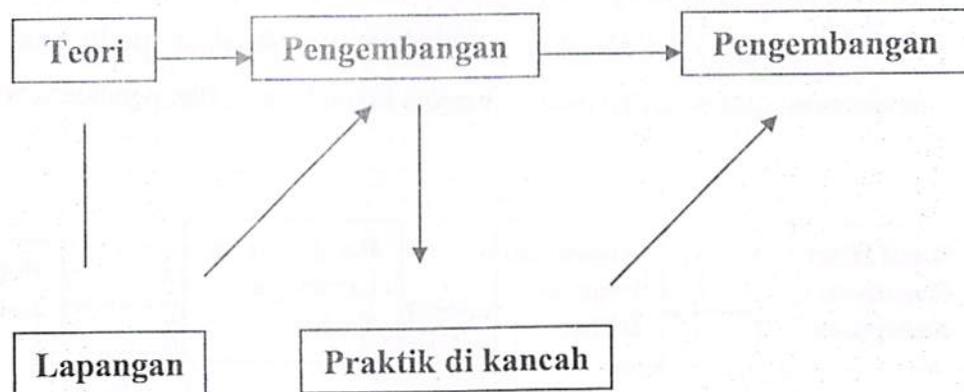
Berpijak pada rumusan tersebut untuk jurusan PLB adanya dukungan struktur kelembagaan sesuai SK Mendiknas nomor 010/0/2000 pasal 430 disebutkan adanya Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi yang didalamnya terdapat Studi Pendidikan Guru taman kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Kepmendiknas ini ditindak lanjuti di daerah dengan adanya Sub Dinas Pendidikan TK, SD, SLB, dan SLTP. Dari jaringan struktur ini menunjukkan relevansinya antara penyiapan ketenagaan di Perguruan Tinggi dan pengelolaan lembaga persekolahan di Pusat dan Daerah, sebagai lembaga baru dan kebijakan baru memberi peluang untuk membentuk *networking* mengisi perannya masing-masing.

Ishartiwi (2001) melalui Pusat Penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan model *Stakeholders Networking* untuk pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam praktek persekolahan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan :

- a. Perguruan Tinggi (Jurusan) mengisi aspek akademik dari program-program pendidikan sebagai hasil kebijakan pemerintah daerah maupun pelulusan di sekolah.
- b. Membangun kesamaan visi terhadap program pendidikan antara BAPEDA, Dinas, serta Sekolah.
- c. Membangun *team work* yang profesional dan bersifat kelembagaan, bukan perorangan.

- d. Mempunyai target yang jelas setiap pelaksanaan program pendidikan bentuk target akademik dan target pembangunan kelembagaan.
 - e. Program yang bersifat kontinyu yang dicapai setahap demi setahap.
 - f. Program kerja menyatukan fusi daerah melalui kebijakan-kebijakan, visi jurusan PLB, dan visi sekolah.
 - g. Menerapkan pula pendampingan untuk pemberdayaan sekolah.
 - h. Program kerja didasari pengkajian keilmuan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan jurusan PLB dan pemerintah daerah.
 - i. *Stakeholders networking* dilaksanakan secara mitra dan duduk sejajar, tidak saling menjadi sub ordinat.
2. Implementasi Stakeholders Networking
- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

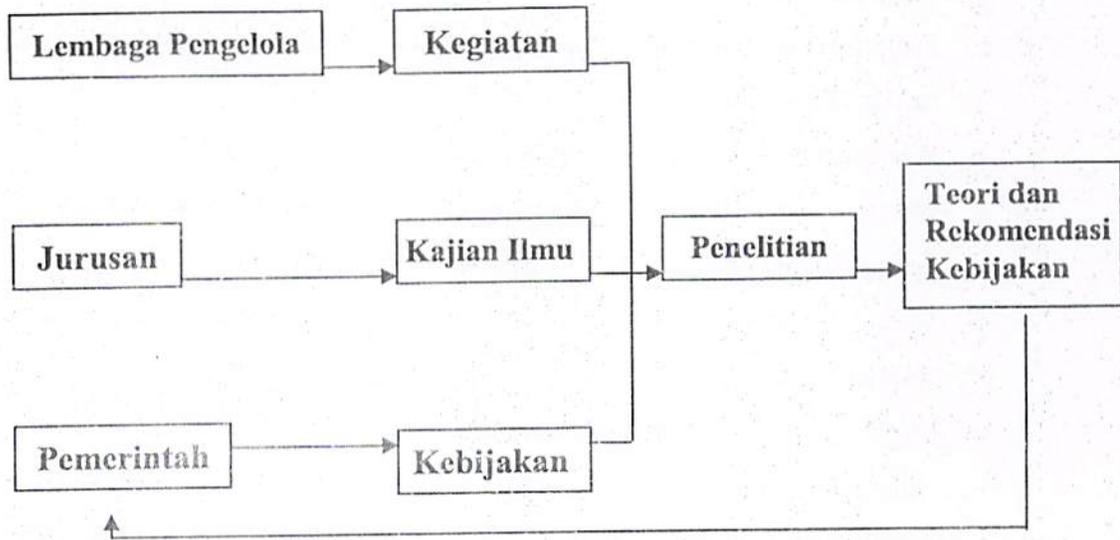
Perkuliah di jurusan sedapat mungkin dikaitkan dengan konteks lapangan (pemerintah maupun persekolahan). Dalam hal ini lapangan difungsikan sebagai laboratorium. Di sini saling mengisi kebutuhan antara pengembangan kelembagaan lapangan dan implementasi teori untuk pengembangan kemampuan problem solving mahasiswa.



- b. Bidang Penelitian

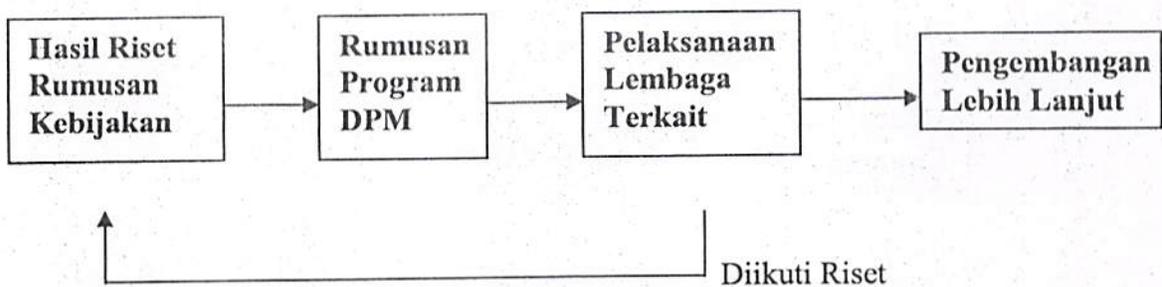
Penelitian jurusan seharusnya diwarnai dalam bentuk penelitian pengkajian keilmuan dan penelitian kebijakan. Kedua bentuk penelitian tersebut dikemas dalam menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan makro dan mikro. Output dari penelitian bersifat rumusan relevansi kebijakan yang

relevan dengan daerah. Tema-tema dan permasalahan penelitian lebih bersifat kelembagaan dan bukan perorangan.



D. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat lebih bersifat menerapkan model *Research and Development* program-program di dasarkan pada hasil-hasil riset dan rumusan bersama dengan *stakeholders*. Ini akan memberikan multi manfaat dalam pelaksanaan program dan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan daerah.



E. Proses Stakeholders Networking

1. Analisis kebutuhan dilakukan di masing-masing kelembagaan yaitu jurusan PLB, lembaga pengelola PLB, dan pemerintah daerah (institusi).

2. Rumusan prioritas program, dengan merumuskan hasil analisis kebutuhan ke masing-masing institusi.
3. Perencanaan-perencanaan dilakukan secara bersama, jurusan berperan merumuskan target akademik, pemerintah berperan dalam kerangka kebijakan daerah, pedoman, prosedur kerja, dan lain-lain. Lembaga pengelola terkait dengan kebutuhan pengembangan dan modal yang dimiliki.
4. Pelaksanaan program dilaksanakan dengan target kualitas bukan sekedar administrasi oriented. Pelaksanaan mencakup tahap pemahaman konsep, pengembangan rancangan, dan uji coba lapangan dengan pendamping sekolah.
5. Evaluasi program, lebih bersifat pembandingan dan bukan *punishment* yang dilakukan dari aspek pencapaian kualitas, dan pencapaian administrasi.
6. Pengembangan lebih lanjut di dasarkan pada pencapaian kinerja dan perumusan pada sosialisasi wilayah sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdasmen (2001) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Dikmen Jakarta
- Ishartiwi (1999) *Perencanaan Program Kerja Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Di DIY, Naskah Kerja*, disajikan dalam rapat koordinasi jajaran Dinas Pendidikan Propinsi DIY, di Hotel Matahari 11-13 November 1999.
- Ishartiwi (2001) *Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan ALB Pasca Sekolah, Makalah*, disajikan dalam seminar nasional DNIKS, di hotel Indonesia.
- Mulyani A. Nurhadi (2001) *Pemberdayaan Dalam Perencanaan Pendidikan Di Daerah. Makalah*. Dalam seminar Dies Natalis ke 37 UNY 19 Mei 2001.
- Sukamto, Ishartiwi, Suryati S, (2001) *Studi Penjajagan Kebijakan Desentralisasi Dalam Pendidikan Di Propinsi DIY, Hasil Penelitian*, Lembaga Penelitian UNY.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.